

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik Moro adalah konflik yang terjadi di Filipina selatan tepatnya terjadi di wilayah Mindanao yang penduduknya beragama Islam. Konflik ini memiliki beberapa macam, diantaranya adalah konflik internal dan eksternal. Konflik dapat dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya adalah perbedaan dan juga faktor sejarah. Filipina juga memiliki kriminalitas tinggi yang berhubungan dengan pemikiran radikal di kawasan Asia Tenggara, maka dari itu terdapat kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran tersebut merasa tidak adil karena wilayah otonom Islam di Filipina semakin dikucilkan. Pada tahun 1926 mulai terjadi konflik antara pemerintah AS dan penduduk Mindanao disebabkan oleh kebijakan AS yang menggabungkan pemerintah yang berada di Luzon dengan yang ada di Mindanao melalui kebijakan Bacon Bill. Setelah Filipina mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1946 keadaan masyarakat muslim di Filipina di bagian selatan yaitu di Sulu dan Mindanao tidak mengalami perubahan signifikan yang mengarah pada kestabilan kondisi sosial budaya dan politik di Filipina. Suku Moro yang merupakan penduduk minoritas yang beragama Islam merasakan bahwa tidak ada usaha dari pemerintah Filipina untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat Muslim di Filipina, umat Muslim di Filipina yang selalu saja terpinggirkan sejak proses Kristenisasi di tahun 1940 setelah Filipina mendapatkan kemerdekaan dari Amerika Serikat (Lizzie, 2010). Kelompok yang pertama terbentuk di Moro ialah MIM dan kelompok ini dibentuk pada tahun 1968 dipimpin oleh Utdog Matalam. Organisasi ini memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari Filipina dan mendirikan negara Islam karena partai dari pihak Islam tidak mendapatkan hak dalam pemerintahan. Selanjutnya, MNLF yang berdiri pada tahun 1969 dan MILF ada di tahun 1984. Kedua kelompok ini mempunyai pemimpin yang berbeda, MNLF dipimpin oleh Nur Misuari sedangkan MILF dipimpin oleh Salamat Hakim. MNLF dan MILF terbagi karena Nur Misuari dianggap tidak mampu menyampaikan aspirasi mayoritas Muslim Moro yang telah melakukan penandatanganan kesepakatan dengan pemerintah Manila tanpa menyelesaikan prinsipil bagi Suku Moro. MILF bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan Moro. (Apa dan Siapa Bangsa Moro - VOA-ISLAM.COM, 2009). Dalam konflik ini beberapa organisasi-organisasi Islam di Filipina selatan juga terlibat dalam penyelesaian konflik Moro dengan pemerintah Filipina seperti Moro National Liberation Front (MNLF), Moro Independent

Movement (MIM), Bangsamoro Liberation Organization (BMLO), Moro Islamic Liberation Front (MILF), Islamic Command Council (ICC). Moro merupakan sebuah etnis Muslim yang terletak di wilayah Filipina Selatan di Pulau Mindanao. Masyarakat Muslim mayoritas berada di Lima Provinsi (Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, dan Tawi-Tawi). Perjuangan Umat Muslim Moro yang menentang kehadiran bangsa asing seperti Spanyol, Amerika Serikat, Jepang serta perjuangan mempertahankan jati diri dari kebijakan pemerintah Filipina yang seakan-akan menyudutkan posisi umat Muslim Moro telah menimbulkan sejarah baru penindasan umat Muslim di wilayah Asia Tenggara. (Saifullah, 2008, hal. 64)

Kenyataan isu-isu kejam sendiri adalah awal dari bangsa Spanyol yang mencap bangsa Filipina sebagai bangsa yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Tercatat berbagai perjanjian antara suku Moro dengan pemerintah Filipina telah dirancang dan ditandatangani, seperti perjanjian Tripoli 1976, Final Peace Agreement (FPA) 1996, dan Memorandum of Agreement on Ancestral Domain (MOA-AD 2008). Namun perjanjian-perjanjian tersebut selalu mengalami kegagalan hingga menyebabkan berbagai pemberontakan yang dilakukan suku Moro sebagai bentuk kekecewaan mereka. Akhirnya pada tahun 2012 pemerintah Filipina berusaha membuka kembali dialog dengan salah satu organisasi Muslim yang telah dibentuk yaitu MILF untuk membicarakan konflik yang terjadi. Dalam dialog kesepakatan tersebut suku Moro yang diwakili oleh MILF mengajukan berbagai tuntutan yang mereka inginkan. Tidak hanya suku Moro, pemerintah Filipina juga mengajukan tuntutan dalam dialog tersebut. Setelah melalui dialog yang panjang, akhirnya disepakatilah bahwa pemerintah Filipina akan menjamin hak-hak dasar suku Moro dalam berbagai hal. Atas kesepakatan itulah, maka MILF mau menandatangani nota kesepakatan yang diajukan oleh pemerintah Filipina, kesepakatan tersebut ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2012 dan diberi nama Framework Agreement of Bangsamoro (FAB).

Dalam usaha perdamaian antara pemerintah Filipina dengan kelompok-kelompok pemberontak, Indonesia adalah salah satu yang berperan dalam usaha perdamaian yaitu dengan bertindak sebagai mediator. Selain sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia telah menjadi pihak yang mendapat pengakuan dari pemerintah Filipina terhadap kesamaan keadaan sosial budaya dan politik. Pengakuan politik merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi sebuah kaum minoritas. Melalui pengakuan politik, kelompok minoritas akan merasa benar-benar ada dan dihormati sebagai bagian dari masyarakat secara menyeluruh. Pengakuan politik juga dapat dikatakan mampu meminimalkan diskriminasi terhadap sebuah kelompok minoritas atas budaya maupun kultur yang mereka anut. Hal ini membuat

pemerintah Filipina memiliki harapan bahwa Indonesia mampu memberikan solusi terhadap masalah di Filipina. Sebelumnya hubungan Indonesia-Filipina bermula dari terbentuknya organisasi Maphilindo yang merupakan organisasi dari tiga negara, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia namun dalam perkembangannya organisasi ini tidak berjalan baik dikarenakan gesekan kepentingan antar negara, khususnya Malaysia dengan Filipina dalam konflik Sabah. Dari sini dapat terlihat bagaimana Indonesia mengambil kesempatan dalam perpolitikan internasional yang berskala regional, dimana Indonesia memiliki daya tarik tersendiri dalam hal kepercayaan negara lain untuk menyelesaikan berbagai kasus rumit yang menyulitkan. Dari peran Indonesia dalam upaya pemulihan hubungan Malaysia-Filipina ini menghasilkan hubungan kerjasama bilateral yang sama-sama menguntungkan. Oleh karena itu Indonesia secara politik memiliki reputasi baik dalam menerapkan politik luar negerinya terhadap perkembangan politik internasional yang anarki. (Anggara, 2018, hal. 60)

Untuk mengatasi masalah tersebut presiden Marcos meminta bantuan Indonesia mengenai upaya penyelesaian konflik Filipina MNLF kala itu, tahun 1995 pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menawarkan jasa baik menengahi konflik itu. Dari sinilah keterlibatan Indonesia dengan Filipina yang bersifat politik mulai terjalin. Menanggapi permintaan negara tetangga tersebut, Presiden Soeharto langsung memberikan respon sesuai dengan perspektifnya untuk mengatasi krisis di Filipina tersebut. Saat itu presiden Soeharto mengajukan empat usul untuk mengatasi permasalahan Moro. Pertama, adanya jaminan bagi masyarakat Muslim di Filipina Selatan untuk menganut kepercayaan mereka dan mengembangkan kebudayaan mereka tanpa adanya pembatasan dari pemerintah yang melanggar HAM. Kedua, tradisi dan budaya Islam dihargai secara universal secara keseluruhan. Ketiga, tanah-tanah nenek moyang Suku Moro dikembalikan kepada penduduk setempat. Keempat, masyarakat Islam berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional di Filipina. (Anggara, 2018, hal. 7)

Namun presiden Marcos sempat menolak beberapa usulan dari Soeharto yang menyatakan bahwa tanah nenek moyang suku moro di kembalikan kepada penduduk setempat. Penolakan tersebut dilandasi bahwa tanah moro tidak mungkin dikembalikan ke masyarakat Islam dikarenakan kebanyakan dari tanah tersebut berada ditangan masyarakat Kristen yang membentuk mayoritas kemasyarakatan di wilayah Filipina selatan. Indonesia sempat kecewa terhadap Filipina dan tidak mau lagi membantu konflik yang terjadi di Filipina Selatan atas penolakan dari Marcos terhadap usulan Soeharto. Selain itu presiden Filipina mengesampingkan Indonesia dan berupaya mendekati negara-negara Timur Tengah

dan Organisasi Konferensi Islam untuk menyelesaikan konflik moro. Awal mulanya Indonesia berperan dalam konflik Moro pada tahun akhir 1990 an pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI ke 20 di Istanbul, di mana Turki, Indonesia, dan Bangladesh masuk ke dalam komite enam. Pertemuan di Bogor, melalui Jakarta Informal Meeting I dan II dengan Indonesia sebagai interlocutor berhasil membantu upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan di dalam negara-negara tetangga yang terjadi diskriminasi terhadap masyarakat minoritas Muslim, termasuk salah satunya kasus di Filipina Selatan dan Indonesia juga pernah menjadi penengah dalam penyelesaian konflik 1996 dengan Libya. Kemudian berlanjut pada tahun 2001-2013, dimana pada tahun tersebut Indonesia melakukan perannya sebagai ketua komite dan di tahun 2013 Moro mendapatkan keadilan di Filipina. Salah satu poin terpenting dari perjanjian itu adalah suku moro bersedia menghentikan perlawanan militernya. Salah satu keputusan penting lainnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Filipina adalah memberikan otonomi khusus kepada masyarakat moro mayoritas beragama Islam yang mendiami kepulauan Mindanao beserta gugusannya di Filipina Selatan. (Rachmatsyah, 2016, hal. 66)

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang ditarik oleh penulis adalah: Mengapa Indonesia Terlibat Dalam Penyelesaian Konflik Moro Di Filipina Selatan tahun 1990-2013?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapat jawaban dari rumusan masalah yang sudah diajukan oleh penulis, yaitu:

1. Mengetahui penyebab keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian konflik Moro di Filipina dengan menggunakan kerangka pemikiran politik luar negeri dalam perspektif konstruktivisme tentang konsep kolektif identitas.
2. Mengetahui alasan mengapa Indonesia mau terlibat dalam konflik Moro di Filipina

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan makalah ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang menjelaskan isu-isu kontemporer dalam Hubungan Internasional, serta menambah wawasan mengenai pengaplikasian ilmu Hubungan Internasional dalam interaksi antar negara. Secara spesifik, penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian konflik Suku Moro di Filipina. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk dijadikan sumber informasi mengenai hal apapun yang berkaitan dengan peran Indonesia terhadap negara-negara di ASEAN. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengimplentasian konsep-konsep konstruktivis dalam Hubungan Internasional untuk menganalisis isu-isu kontemporer yang menyangkut konflik antarnegara.

b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis seperti : Mengidentifikasi proses dan kebijakan politik apa yang diangkat oleh negara-negara bersengketa.

1.4 Kerangka Teori

Untuk memahami pola Hubungan Internasional diperlukan pemahaman mengenai identitas suatu pihak, kelompok atau individu dalam menempatkan dirinya terhadap suatu fenomena yang terjadi. Langkah ini merupakan langkah penting bagi para Konstruktivis untuk dapat memahami identitas suatu pihak atau kelompok untuk dapat menjelaskan dan mengerti bagaimana pemikiran suatu pihak terhadap fenomena yang terjadi yang datang saat ini, sekarang, atau di masa mendatang. Dengan memahami identitas, pola dasar yang digunakan oleh negara, maka akan menjadi mudah dalam memahami dan mengerti penjelasan mengenai sikap terhadap suatu fenomena. Tidak hanya itu, hal ini juga memungkinkan penjelasan bagi aktor negara, atau kelompok, dalam hal ini adalah identitas kelompok moro. Identitas yang seperti telah dijelaskan sebelumnya merupakan bentuk atau hasil dari pemikiran, struktur, dan makna. Dalam konflik ini, suku moro dan pemerintah

Filipina sama-sama memiliki identitas masing-masing. Filipina mempertahankan identitasnya sebagai sebuah negara untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya, dan disisi lain suku moro berupaya untuk mencapai identitasnya sebagai suatu wilayah yang merdeka dan bebas dari Filipina. Kerangka teoritis digunakan untuk menyederhanakan fenomena-fenomena yang telah terjadi di dunia sehingga dapat dimengerti dengan mudah. Sehingga dalam hal ini penulis menggunakan kerangka pemikiran agar mempermudah penulis untuk menjelaskan penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif Konstruktivisme.

Konstruktivisme merupakan perspektif yang bukan asli lahir dari studi Hubungan Internasional, melainkan berasal dari sosiologi. Perspektif konstruktivisme diadopsi ke dalam studi Hubungan Internasional karena dinilai memiliki poin-poin penting yang dapat menjelaskan beberapa aspek politik dunia. Jika pemikiran dan ide yang masuk ke dalam keberadaan hubungan internasional berubah, maka sistem itu sendiri juga akan berubah karena sistem terdiri dari pemikiran dan ide, para konstruktivisme menyadarkan pada pandangan tersebut untuk menekankan pentingnya makna dan pemahaman. Konstruktivisme di perkenalkan ke HI oleh Nicholas Onuf (1989). Lalu di kembangkan lagi dalam HI oleh Alexander Wendt. Inti argumen Wendt adalah penolakan posisi kaum neorealis yang menurutnya anarki, dalam proses interaksi ini identitas dan kepentingan negara di ciptakan. (Sorensen, 2013, hal. 377)

Selain itu perspektif konstruktivisme menekankan peran norma dalam perilaku masyarakat. Kebijakan luar negeri misalnya, bukan hanya masalah kepentingan nasional, tetapi juga dari perilaku yang dapat diterima di masyarakat internasional. Perilaku negara di definisikan oleh identitas dan kepentingan, identitas dan kepentingan di definisikan dengan kekuatan internasional, yaitu dengan norma-norma perilaku yang ditanamkan dalam masyarakat internasional. Norma- norma masyarakat internasional ditularkan kepada negara melalui organisasi internasional. tidak hanya untuk menjelaskan kepentingan, identitas juga berperan dalam pembuatan keputusan. Ketika membicarakan identitas, konstruktivis menemukan fakta bahwa identitas tersebut dapat berubah. Identitas suatu negara dapat berubah ketika negara memasuki hubungan yang baru dan menjadi tersosialisasi dalam proses berhubungan tersebut. Selain norma-norma, konstruktivis juga menekankan peran lembaga atau institusi. Sejalan dengan minat konstruktivisme dalam hubungan antara struktur dan agency, konstruktivis menganalisis institusi dengan fokus khusus pada proses pelembagaan. Namun fokusnya pada norma-norma dan lembaga-lembaga, tidak berarti

bahwa konstruktivis sosial mengabaikan peran interest. (Sorensen, 2013, hal. 377) Kaum konstruktivisme juga meyakini bahwa tindakan aktor sangat dipengaruhi oleh persepsi atau pemaknaan terhadap suatu obyek, atau aktor lain, sebagaimana dikatakan oleh Alexander Wendt bahwa :

“a fundamental principle of constructivist social theory is that people act toward objects, including other actors, on the basis of the meanings that the objects have for them”

Dengan jelas Wendt menyatakan bahwa tindakan aktor terhadap obyek atau aktor lain sangat ditentukan oleh persepsi atau pemaknaan terhadap obyek atau aktor lain tersebut, dimana persepsi atau pemaknaan tersebut terbentuk dari hasil konstruksi sosial. Pada intinya kaum konstruktivisme berpendapat bahwa dunia internasional dipengaruhi oleh adanya ide dan gagasan bersama yang menjadi sebuah norma dalam kerangka struktur internasional. (Wendt, 1992, hal. 391-425)

Secara lebih spesifik penelitian akan menekankan asumsi dasar dalam Konstruktivis yang dirasa penting untuk meneliti permasalahan dalam penelitian ini yaitu Indonesia tampak konsep yang menonjol adalah identitas. Asumsi tersebut dipilih karena adanya keterkaitan dan keterlibatan Indonesia terhadap konflik moro di Filipina. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas yang beragama Islam selain itu Indonesia juga memiliki kemajemukan dalam kehidupan beragama, pada tataran internasional dan regional Indonesia tidak henti-hentinya mendukung upaya dialog antar umat beragama sebagai resolusi damai dan demokratis dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan.

Indonesia memiliki tanggung jawab etis terhadap kelompok moro, dan Indonesia pun di mintai sebagai ketua perdamaian karena Piliphina sendiri percaya kepada Indonesia menjadi fasilitator atau penengah dari konflik moro tersebut. Keberhasilan ini nampaknya mendorong negara negara OKI untuk meminta Indonesia kembali berperan dan mengupayakan perdamaian di Filipina Selatan. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia yang tergolong dengan muslim yang moderat dan berada di Asia Tenggara telah memosisikan diri secara aktif dalam perdamaian perdamaian dunia. Alexander Wendt mengkategorikan identitas menjadi empat jenis, yakni identitas personal (personal identity), identitas yang dikategorikan (type identity), identitas peran (role identity), dan identitas kolektif (collective identity), keempat identitas tersebut melahirkan kepentingan yang berbeda-beda tergantung dengan konteks yang dipilih. Setelah disebutkan dalam hal ini penulis akan menggunakan salah satu jenis konsep identitas yang telah disebutkan. Jenis

konsep identitas yang digunakan penulis ialah jenis konsep identitas yang keempat yakni identitas kolektif (collective identity). (Wendt, *Social Theory of International Politics*, 2003, hal. 224)

Faktor pembentuk identitas kolektif terbagi menjadi tiga, yakni struktural, sistemik, dan strategis. Struktural disini ialah faktor intersubjektivitas antar negara mengacu pada bagaimana negara-negara mengidentifikasi satu sama lain. Sistemik berkaitan dengan interaksi antar negara, saling ketergantungan dan kesamaan nilai yang dianut. Strategis berkaitan dengan sikap dan komunikasi, dimana menunjukkan sikap pantas atau tidak antara satu sama lain. Indonesia yang dikenal sebagai negara yang masyarakatnya ramah dengan pendatang, apalagi masyarakat kita melihat adanya konflik yang melibatkan kaum muslim yang membutuhkan bantuan. Sebagai satu identitas masyarakat muslim tidak hanya diam, apalagi terjadinya pembunuhan atau peperangan.

1.5 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya konflik muslim Moro di Filipina selatan yang menyebabkan negara-negara di ASEAN ikut turut serta dalam penyelesaian konflik tersebut. Salah satunya Indonesia yang terlibat dalam penyelesaian konflik Moro di Filipina, dalam kasus tersebut mengapa Indonesia sangat berperan aktif dalam penyelesaian konflik moro selain wilayahnya yang berdekatan, dan disebabkan karena kelompok yang terjadi di Filipina Selatan itu kelompok muslim yang di diskriminasi oleh pemerintah dan adanya tindakan kekerasan kepada warga di daerah Mindanao yang dimana daerah tersebut adalah penduduk yang beragama Islam. Dalam kasus ini collective identity menjadi jawaban atas Indonesia dalam perannya untuk menyelesaikan konflik Moro di Filipina. Indonesia memiliki tanggung jawab etis terhadap kelompok moro, dan Indonesia pun di mintai sebagai ketua perdamaian. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia yang tergolong dengan Muslim yang moderat dan berada di Asia Tenggara telah memosisikan diri secara aktif dalam perdamaian perdamaian dunia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1. Identitas

Identitas menurut Alexander Wendt adalah identitas sebagai atribut yang melekat pada diri aktor yang mendorong tindakan, artinya identitas dapat membentuk kepentingan aktor baik seorang maupun negara, yang kemudian kepentingan itu membentuk tindakan yang nantinya secara tidak langsung juga akan membentuk identitas, baik identitas yang sama maupun identitas yang baru. Identitas juga mengidentifikasi aktor sesuai dengan konstruksinya seperti; suku, ras agama, kelompok ekonomi, politik dst. Wendt juga membagi empat jenis identitas dalam Hubungan Internasional yaitu:

a. Identitas personal (personal identity)

Suatu aktor terbentuk secara alamiah seperti contohnya bentuk fisik, lambang negara, nasionalisme. Atribut yang membentuk eksistensi negara yang dapat membedakannya dengan negara lain.

b. Identitas yang dikategorikan (type identity)

Yang dipengaruhi oleh kategori tertentu seperti ideologi politik atau agama.

c. Identitas peran (role identity)

Memfokuskan kedudukan atau posisi aktor dalam Hubungan Internasional. Identitas ini baru bisa terbentuk apabila aktor yang bersangkutan melakukan suatu aktivitas Hubungan Internasional dengan aktor lain dan mendapat tanggapan.

d. Identitas kolektif (collective identity)

Jenis identitas ini terbentuk ketika terdapat suatu kelompok yang berisikan kumpulan aktor negara yang saling berhubungan, dan akhirnya membentuk suatu identitas yang dimiliki secara bersamaan karna bergabung dengan kelompok tersebut.

Pada umumnya, aktor tersebut dapat bernegosiasi dan memilih salah satu identitas yang lebih relevan dan penting dalam menghadapi situasi tersebut tanpa mengorbankan identitas yang lain. Namun apabila identitas yang saling bertolak belakang sama-sama memiliki cara atau solusi yang relevan dan penting dalam mengatasi situasi yang dihadapi sebelumnya, konflik identitas semakin sulit untuk dipecahkan kecuali aktor tersebut harus berkorban dengan menghilangkan salah satu identitas yang bertolak belakang dalam rangka menyelesaikan situasi yang dihadapi.

Ada faktor yang membentuk identitas kolektif terbagi menjadi tiga, yakni struktural, sistemik, dan strategis. Struktural disini ialah faktor intersubjektivitas antar negara mengacu pada bagaimana negara-negara mengidentifikasi satu sama lain. Sistemik berkaitan dengan interaksi antar negara, saling ketergantungan dan kesamaan nilai yang dianut. Strategis berkaitan dengan sikap dan komunikasi, dimana menunjukkan sikap pantas atau tidak antara satu sama lain. Identitas kolektif menjadi jawaban atas Indonesia dalam perannya untuk menyelesaikan konflik Moro di Filipina. Indonesia memiliki tanggung jawab etis terhadap kelompok moro, dan Indonesia pun di mintai sebagai ketua perdamaian. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia yang tergolong dengan Muslim yang moderat dan berada di Asia Tenggara telah memposisikan diri secara aktif dalam perdamaian perdamaian dunia.

1.6.1.2. Norma

Untuk menjelaskan mengenai istilah Norma-norma, perlu dilakukan pemisahan arti terlebih dahulu untuk mempermudah pendefinisian pengertian norma menurut KKBI adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan tingkah laku. Norma juga telah didefinisikan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma adalah Sesuatu yang seharusnya ada, terutama terkait manusia yang harus berperilaku dengan cara tertentu. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa norma dapat diartikan sebagai pedoman perilaku yang dianggap benar yang berisi tentang anjuran serta larangan yang berlaku dalam masyarakat. Setiap norma, nilai dan kepentingan ini tidak berada secara terisolasi dari yang lainnya, melainkan saling berhubungan dan bahkan saling bergantung. kesaling tergantungan ini merupakan suatu keniscayaan. Fenomena saling ketergantungan akan mendorong keteraturan sosial atau solidaritas sosial, tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa kompetisi antara berbagai norma, nilai dan kepentingan akan menjadi ancaman bagi solidaritas sosial itu sendiri. Indonesia sendiri sebagai negara dengan penduduk mayoritas yang beragama Islam selain itu Indonesia juga memiliki kemajemukan dalam kehidupan beragama, pada tataran internasional dan regional Indonesia tidak henti-hentinya mendukung upaya dialog antar umat beragama sebagai resolusi damai dan demokratis dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan.

Dalam paradigma atau pemikiran konstruktivisme, sebuah norma tidak muncul dengan sendirinya, melainkan sebuah nilai atau norma yang muncul dimana dalam hal ini aktor yang memunculkan nilai atau norma biasanya dalam bentuk platform organisasi internasional ataupun negara yang melakukan upaya-upaya untuk menginternasionalisasikan nilai atau

norma yang diyakini benar. (Finnemore, 1998, hal. 887) Martha Finnemore berpendapat bahwa norma-norma internasional yang dikemukakan oleh organisasi internasional dapat secara meyakinkan memengaruhi panduan nasional dengan mendorong negara-negara untuk mengadopsi norma-norma tersebut dalam kebijakan nasionalnya. (Robert Jackson, 2013, hal. 381)

1.6.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah eksplanatif penelitian eksplanatif berupaya menjelaskan faktor sebab akibat dari suatu permasalahan atau fenomena. Penelitian eksplanatif membutuhkan definisi konsep, kerangka konseptual dan kerangka teori. Dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan sebab atau faktor-faktor terjadinya keterlibatan Indonesia dalam konflik suku moro pada awal tahun 1990. Filipina memiliki konflik di wilayah Selatan tepatnya di daerah Mindanao yang dihuni dengan penduduk beragama Islam, atau disebut suku moro. Suku moro yang merupakan penduduk minoritas yang beragama Islam merasakan bahwa tidak ada usaha dari pemerintah Filipina untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat muslim di Filipina, umat muslim di Filipina yang selalu saja terpinggirkan sejak proses Kristenisasi di tahun 1940.

1.6.3. Jangkauan Penelitian

Jangkauan waktu pada penelitian ini meliputi batasan tahun 1990-2013 dan meliputi batasan ruang yaitu Indonesia dan Filipina. Batasan waktu dimulai pada tahun 1990-2013 karena pada tahun tersebut Indonesia memulai terlibat dalam konflik suku Moro di Filipina Selatan. Lalu pada tahun 1995 pemerintah Indonesia menawarkan jasa baik menengahi konflik itu. Saat itu presiden Soeharto mengajukan empat usul untuk mengatasi permasalahan Moro. Berlanjut dengan perannya Indonesia pada 16 September 1996 dengan FPA sebagai bentuk perjanjian menggantikan Tripoli Agreement dan ditanda tangani oleh kedua pihak dan kemudian berlanjut pada tahun 2001-2013, dimana pada tahun tersebut Indonesia melakukan perannya sebagai ketua komite dan di tahun 2013 Moro mendapatkan keadilan di Filipina.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data dalam penelitian ini berdasarkan dari data sekunder yang didapatkan dari riset terdahulu, buku, majalah, jurnal, berita, artikel, surat kabar, internet, dokumen-dokumen, dan bentuk tulisan lainnya yang mendukung dan relevan dengan objek penelitian.

Berdasarkan sumber-sumber tersebut penelitian mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang kemudian dipilih agar sesuai dengan sistematika penulisan. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji atau diteliti. Informasi dan data tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, undang-undang, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, surat kabar, dan informasi tertulis lainnya.

1.6.4 Teknik Analisa Data

Dalam teknik menganalisis data, peneliti akan menggunakan teknik kongruen. Dimana peneliti akan menggunakan beberapa asumsi dasar dari suatu teori untuk kemudian dicocokkan dengan fakta-fakta dan bukti data-data yang diperoleh peneliti selama penyusunan penelitian ini. Untuk proses lebih lanjut, penelitian ini akan menggabungkan teknik kongruen tersebut dengan tiga tahap penelitian kualitatif Miles dan Hebermas. Menurut Miles dan Hebermas, dalam analisa data kualitatif akan melalui tiga tahap yang harus dilalui peneliti secara berurutan, yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahap tersebut terjadi secara berurutan dengan skema waktu yang terjadi sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data, dimana setelah terkumpul data-data tersebut disusun secara sejajar dan menghasilkan wawasan umum atau yang sering disebut dengan analisa (Silalahi, 2009: 339).

1.6.5 Sistematika Penulisan

Pada BAB I Pendahuluan, penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian, argument dasar dan sistematika penulisan.

BAB II Dinamika konflik Moro bab ini akan dijelaskan mengenai dinamika konflik Moro dari masa ke masa hingga munculnya perjanjian damai 1996. Upaya penyelesaian konflik melibatkan aktor internasional dan organisasi interasional.

BAB III Akan membahas mengenai analisis munculnya faktor pendorong Indonesia dalam penyelesaian Konflik Moro di Filipina, dan menjelaskan secara spesifik mengenai prinsip non-interference ASEAN yang menjadi kendala dari Indonesia dalam konflik Moro di Filipina.

BAB IV Penutup, bab ini akan menjelaskan kesimpulan, saran dan evaluasi dari penelitian yang dilakukan penulis.